

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia (Cetakan ke 6)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019)
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Alwesi. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2022).
- BN Marbun. *Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum* (Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI, 2009)
- Boedi Harsono. *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 1971).
- _____, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Cet 1*, (Jakarta: Universitas trisakti, 2007)
- _____, *Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1*, (jakarta: Djambatan, 2008).
- Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria, Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2017).
- Gunawan widjaja dan Kartini Widjaja, *Jual beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Herlina Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Kata Notaris, Cet Ke 1*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018).
- H. Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata*, (Bandung: P.T ALUMNI, 2006).
- Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- J Andy Hartanto 1, *Hukum Pertanahan, Karakteristik, Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).

- _____, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, (Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2009).
- J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999).
- Kurnia Ghazali, *Cara Mudah Mengurus Sertipikat Tanah*, (Jakarta: Kata Pena, 2013).
- Munir fuady, Arbitrase Nasional; *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet.II*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1996).
- _____, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Bakti, 2006).
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010).
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1981).
- _____, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1980).
- Sudargo Gautama dan Abdul Rahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*. (Bandung: Alumni, 1980).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1981).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Universitas terbuka, Karunika, 2001

_____, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : liberty Yogyakarta, 2002).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Urip Santoso. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012).

_____. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media 2009).

Zainal Arifin. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negeri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1010).

JURNAL

I Gusti Ayu Widiadnyani, et.al, “Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Adat Melalui Perjanjian Dibawah Tangan Dalam Prespektik Undang-Undang Pokok Agraria”I, Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 1, 2018. DOI: [https://ejournal.undiksha.ac.id/article > view](https://ejournal.undiksha.ac.id/article/view)

Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”, Mimbar Hukum, Vol 24, 2012. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor Putusan Nomor 265/Pdt.G/2020/PN Kpg.

LAIN-LAIN

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Penulisan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023)